FAKTOR-FAKTOR PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Febri Yuliani

Program Studi Ilmu Hulum Fakultas Hukum, Universitas Riau Jl. HR Subantas KM 12.5, Simpang Baru, Pekanbaru-Riau email: febby_sasha@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu penyimpan karbon terbesar didunia adalah lahan gambut. Indonesia memilikinya di ketiga pulau terbesar yaitu, Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang luas. Namun pelepasan karbon di lahan gambut juga terjadi berkali lipat daripada tanah bermineral. Hal ini terjadi jika lahan gambut mengalami gangguan seperti dikeringkan atau di buka tutupan hutan diatasnya dengan tujuan misalnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor percepatan implementasi restorasi gambut di kabupaten Rokan hilir. Metode yang digukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Faktor – faktor percepatan restorasi gambut di Kabupaten Rokan Hilir meliputi Faktor Sosial. Faktor Ekonomi. Faktor Alam. Restorasi lahan gambut yang pernah terbakar didorong agar dilakukan lebih masif dengan tidak hanya mengandalkan vegetasi ulang (revegetasi), tetapi secara bersamaan dilengkapi dengan upaya pembudidayaan tanaman lokal. Indikator pertama dalam mengembalikan fungsi gambut ialah dengan membuat lahan tersebut dapat menyimpan air kembali.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, gambut, restorasi gambut

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Gambut Indonesia dikenal dengan sebutan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia (Subajo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998 dalam Wetlands International-Indonesia Programme (WI-IP), 2004). Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan gambut terluas diantara negara tropis, kawasan gambut ini tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 dalam Agus dan Subiksa, 2008). Laporan WI-IP menyatakan bahwa dari luasan kawasan gambut yang dimiliki Indonesia sekitar 5,7 juta ha atau 27,8% terdapat di Kalimantan.

Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh diatasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekeragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuaannya dalam menyerap dan menyimpan karbon) (WI-IP, 2004). Agus dan Subiksa (2008) menyatakan bahwa sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Lebih penting lagi, lahan gambut menyimpan karbon (C) dalam jumlah besar. Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Konversi lahan gambut akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Daerah ini terletak dibagian pesisir timur Pulau Sumatera dengan luas wilayah 8.881,59 km² terletak pada posisi 1°14′ 2°30′ LU serta antara 100°16′-101°21′BT. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah: sebelah utara: Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka; sebelah selatan: Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu; sebelah barat: Propinsi Sumatera Utara dan sebelah timur: Dumai.

Secara umum kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kawasan gambut teluas di Provinsi Riau. Curah hutan yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Rokan Hilir tidak merata, pada bulan-bulan tertentu seperti februari sampai dengan bulan Agustus (tujuh dari dua belas bulan) adalah bulan dengan curah hujan terendah dengan suhu 28 °C - 32 °C yang berarti pada bulan-bulan ini keadaan menjadi kering. Pada bulan – bulan inilah sering terjadi kebakaran hutan, karena tanah berada dalam keadaan yang kering dan suhu yang tinggi yang berada diatas rata-rata temperatur tahunan yaitu 27 °C (Riau Dalam Angka, 2015). Pada kondisi ini, kebakaran hutan dan lahan mudah sekali menyebar dari satu area ke area lainnya karena dibantu oleh temperatur yang berada diatas rata-rata yang membuat api mudah menyebar. Hal ini diperparah lagi secara fisiografi hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah tanah gambut yang sangat mudah rusak apabila tidak dipertahankan dalam kondisi alami. Akibatnya, penggunaan lahan ini untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman harus hati-hati terutama berkaitan dengan pemilihan lahan yang ditentukan oleh jenis gambutnya, kedalaman gambut, dan tanah yang ada di bawahnya. Fisiografi gambut di Rokan Hilir termasuk kubah gambut, dimana ketebalan gambut semakin dalam dengan semakin tengahnya lokasi. Pemukiman bila ada biasannya berada dipinggiran kubah ini, dimana ketebalan gambut dangkal.

Fenomena gambut yang terjadi berdampak negative terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran hutan dan lahan untuk membuka areal perkebunan sawit

Tabel. 1 Luas Areal Perkebunan dan Jumlah Produksi Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kuantan Singingi	120.571	429.452,03
2,	Indragiri Hulu	118.215	382.803,36
3.	Indragiri Hilir	212.477	448.877,47
4.	Pelalawan	182.215	620.125,19
5.	Siak	232.708	611.664,43
6.	Kampar	353.728	1.310.106,80
7.	Rokan Hulu	416.436	871.111,33
8.	Bengkalis	170.866	399.639,42
9.	Rokan Hilir	235.736	614.951,35
10.	Pekanbaru	8.080	29.993,66
11.	Dumai	32.416	58.769,95
	Total	2.083.448	5.777.494,99

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2014.

Di Provinsi Riau sebagian besar masyarakat bertumpu kehidupannya pada sektor pertanian, demikian juga dengan masyarakat kabupaten Rokan Hilir pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan sektor pertanian perkebunan kelapa sawit merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Data Kementerian Pertanian, pada 2011, sektor pertanian menyerap 33,51% atau 39,33 juta orang tenaga kerja. Oleh sebab itu, tidak mengherankan masalah pengelolaan gambut merupakan obyek dan sumber kehidupan.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau (BALITBANG PEMPROV RIAU, 2010) mencapai 1.673.551,37 yang terdiri atas perkebunan rakyat sekitar 50,51 %, perkebunan besar Negara (PTPN V) sekitar 4,75 %, dan perkebunan besar swasta sekitar 44,74 %. Produksi CPO mencapai 5.764.201,37 ton yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sebesar 41,08 % oleh sekitar 352.022 KK, selebihnya dihasilkan oleh perkebunan swasta besar 52,55 % dan perkebunan Negara sekitar 6,37 %. Perkembangan perkebunan sawit tersebut selain bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi ternyata juga berpengaruh terhadap permasalahan ekologi dan sosial budaya masyarakat. Permasalahan ekonomi, ekologi dan sosial perlu dilakukan pengelolaan secara integratif dengan mempertimbangkan komponen sumberdaya lokal pada ekosistem setempat, agar pengembangan agroekologi perkebunan kelapa sawit pada berbagai lahan yang ada dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tulisan ini mencoba menguraikan faktor-faktor percepatan implementasi kebijakan restorasi gambut di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

KAJIAN PUSTAKA

Imptementasi Kebijakan

Pressman dan Wildaysky (2014:485) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses intraksi antara tujuan dan tindakan (*implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving then*. Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa implementasi adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah.

In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to he realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a "policy delivery system", in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. (Grindle).

Pendekatan Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa, dalam melakukan analisis implementasi atau evaluasi kebijakan terdapatdua pendekatan, yaitu (Wibawa, 2014 : 96) :

1. Pendekatan kepatuhan,

Pendekatan ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Evaluasi implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan ini akan banyak melakukan analisis perilaku organisasi,

2. Perspektif "apa yang terjadi" (" what's happening").
Pendekatan ini memotret pelaksanaan kebijakan atau program dari segala hal.
Pendekatan ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh segala ragam variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung di dalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji ketimbang selalu mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.Menurut Edward III dalam bukunya "Implementing Public Policy", studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

"The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects." (Edward III).

Ekosistem Gambut

Hutan rawa gambut alami digunakan sebagai dasar acuan "lahan gambut tidak terdegradasi". Apabila kawasan hutan gambut telah terganggu, ditandai dengan pengurangan kerapatan vegetasi hutan dan telah didrainase, diasumsikan lahan tersebut telah mengalami proses degradasi.Lahan gambut terdegradasi ini pada umumnya menjadi sumber emisi dari dekomposisi gambut, walaupun secara agronomis lahannya bisa sangat produktif. Dengan demikian istilah terdegradasi lebih dikaitkan dengan indikator lingkungan,walaupun indikator tersebut sering tidak relevan dengan indikator agronomi, sosial dan ekonomi.

Lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta ha. Lokasi tanah gambut tersebar luas terutama di pulau Sumatera 6, 8 juta ha, dan sebagian besar diantaranya berada di

Kepulauan Riau (4 juta ha). Penelitian terakhir menunjukkan bahwa di Kepulauan Riau sebanyak 200.000 ha lahan gambut sudah diusahakan untuk penanaman kelapa sawit .

Riau mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia, yaitu mencapai 16 meter terutama di wilayah Kuala Kampar . Namun demikian selama dua dasa warsa terakhir, konversi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (pulp wood) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologisnya.

Di pihak lain Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak di belakang tanggul sungai. Pembukaan lahan gambut melalui penebangan hutan (land clearing) dan drainase yang tidak hati-hati akan menyebabkan penurunan permukaan (subsiden) permukaan yang cepat, pengeringan yang tak dapat balik (irreversible drying), dan mudah terbakar.

Potensi gambut yang sangat besar di wilayah ini perlu dikelola secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. restorasi gambut yang menyelaraskan antara fungsiekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Daerah rawa gambut pada umumnya datar dan terletak diantara dua sungai besar. Meskipun disebut datar, lahan rawa gambut ini pada umumnya berbentuk kubah (dome), sehingga terdapat beda ketinggian (elevation) antara pinggir sungai dan tengah diantara dua sungai tersebut sebagai puncak dome. Dalam kondisi tertentu memungkinkan terjadi pergerakan air dari puncak dome ke arah pinggir sungai. Pergerakan air inilah yang memungkinkan ekosistem rawa bergambut dapat menunjang kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riau mempunyai lapisan gambut terdalam didunia, yaitu mencapai 16 meter terutama diwilayah Kuala Kampar. Namun demikian selama dua dasa warsa terakhir, konservasi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (*pulp wood*) diperkirakan telah merusak ekosistem gambut.

Di pihak lain Lahan gambut merupakan suatu ekosisteam yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak dibelakang tanggul sungai. Pembukaan lahan gambut melalui penebangan (*land clearing*) dan drainase yang tidak hati-hati akan menyebabkan penurunan permukanan (*subsiden*) permukaan yang cepat, pengeringan yang tak dapat balik (*irreversible drying*), dan mudah terbakar.

Potensi gambut yang sangat besar di wilayah ini perlu dikelola secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. Pengelolaan gambut yang menyelaraskan antar fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah sebagai regulator mengeluarkan beberapa peraturan yang terus diperbaiki. Pada Tahun 2014 muncul Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta diikuti dengan keputusan pembentukan Badan restorasi Gambut (BRG).

Berdasarkan hasil penelitian berbagai akar penyebab kerusakan gambut adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. pada berbagai kondisi fisik lokasi penelitian yang berbeda terdapat penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan serta penyebab tidak langsung kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan. Ada empat penyebab kebakaran langsung, yaitu: (1) Api digunakan dalam pembukaan lahan, (2) Api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah, (3) Api menyebar secara tidak sengaja dan (4) Api yang berkaitan dengan ekstraksi sumberdaya alam

Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja merupakan penyebab kebakaran yang utama terutama di daerah yang kaya akan sumberdaya alam, dimana terdapat masalah keterbatasan lahan untuk produksi pertanian dan atau dimana terdapat masalah konflik pengusahaan lahan atau akses ke lahan. Walapun bukan merupakan faktor utama, penelitian menunjukan bahwa api digunakan

dalam kegiatan untuk mempermudah akses dalam mengekstrasi sumber daya alam seperti pengambilan ikan, berburu, mengumpulkan madu.

Penyebab tidak langsung kebakaran hutan dan lahan, antara lain : Penguasaan Lahan, Alokasi Penggunaan Lahan, Insentif/Dis-Insientif ekonomi, Degradasi hutan dan lahan, Dampak dari perubahan karateristik kependudukan, Lemahnya kapasitas kelembagaan.

Faktor Percepatan Implementasi restorasi gambut di Kabupaten Rokan Hilir antara lain Faktor Sosial. Secara sosial masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki kesadaran yang mumpuni terhadap restorasi gambut terutama masyarakat dan perusahaan disekitar daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Disisi lain sesunggunya, masyarakat telah memiliki budaya sendiri tentang tindakan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, budaya itu disebut dengan pembuatan sekat bakar, hal ini dilakukan dengan cara 200 meter dari titik api atau kawasan yang telah dibakar maka dibuat sekat selebar 12 meter yang dibersihkan lalu sekat tersebut dialiri air dengan tujuan agar lidah api tidak menjalar keareal lainnya, namun pola budaya seperti ini telah banyak yang ditinggalkan masyarakat, terutama masyarakat pendatang, mereka biasanya lebih sering apabila dilakukan dengan sengaja, mereka membakar kemudian meninggalkan lahan yang terbakar begitu saja sehingga merusak ekosistem gambut.

Faktor Ekonomi. Sebagian besar penduduk asli dan pendatang di Kabupaten Rokan Hilir mengantungkan kehidupannya pada alam, pendidikan yang rendah dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan sementara tuntutan kebutuhan sehari-hari terus meningkat, menyebabkan masyarakat kembali ke alam untuk berladang. Untuk membuka ladang baru masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali membabat hutan atau semak belukar. Akibat dari kondisi ekonomi yang sulit, maka masyarakat dalam membersihkan ladangnya akan mencari cara-cara yang praktis, cepat dan murah yaitu dengan cara membakar. Karena tidak menguasai pengetahuan dalam mengunakan api, tidak jarang terjadi pembakaran yang tidak terkendali akibatnya dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Daerah ini terletak dibagian pesisir timur Pulau Sumatera dengan luas wilayah 8.881,59 km2 yang secara alami di Kabupaten Rokan Hilir rentan kebakaran karena \pm 65 % adalah lahan gambut atau 453.874 Ha/11.22 % yang sifatnya mudah terbakar dan dengan titik api dibawah permukaan tanah. Aspek lain yang perlu dicermati sebagai faktor percepatan implemetasi restorasi gambut antara lain adalah faktor insentif dan disinsentif bagi pengusaha dan masyarakat, , target produksi dan investasi, dana implementasi restorasi gambut.

Keuntungan finasial dari konversi hutan menjadi penggunaan lahan lainnya merupakan faktor utama konversi hutan menjadi non-hutan. Secara umum kegiatan konversi hutan tersebut menggunakan api dalam persiapan lahan. Hutan alam sering dipandang kurang mempunyai nilai ekonomi dibanding dengan alternatif lain seperti perkebunan kopi, karet dan kelapa sawit baik petani maupun perkebunan besar.

Demikian pula, sudah ada peraturan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi didalamnya tidak ada mekanisme jaminan kinerja pengelolaan lingkungan (environmental performance bond), seperti besarnya atau banyaknya karyawan yang akan terlibat, dan masalah perizinan yang lama, berarti peraturan tersebut tidak memberikan insentif ekonomi bagi pengusaha. Akibatnya para pengusaha tidak jarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, dengan modus operandi yang berbeda yaitu dengan mengunakan tangan-tangan masyarakat untuk melakukan pembakaran dan pembukaan lahannya yang berdampak langsung terhadap rusaknya ekosistem gambut.

Faktor Alam. Kondisi iklim, dalam hal ini rendahnya curah hujan dan kencangnya tiupan angin merupakan faktor yang memucu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Beberapa kali kebakaran hutan yang besar terjadi pada tahun-tahun kering yang berkepanjangan.

Kerusakan ekositem gambut yang disebabkan oleh kebakaran hutan tidak bisa lepas dari adanya 3 (tiga) komponen penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu bahan bakar, api dan oksigen (O2) yang disebut juga sebagai segitiga api. Kebakaran tidak akan terjadi apabila salah satu komponen tersebut tidak ada.

Restorasi lahan gambut yang pernah terbakar didorong agar dilakukan lebih masif dengan tidak hanya mengandalkan vegetasi ulang (revegetasi), tetapi secara bersamaan dilengkapi dengan upaya pembudidayaan tanaman lokal. diperlukan waktu hingga 17 tahun untuk merestorasi la—han gambut yang terbakar. Itu pun baru mencapai tingkat lahan sekunder atau belum sehat secara sempurna.

Indikator pertama dalam mengembalikan fungsi gambut ialah dengan membuat lahan tersebut dapat menyimpan air kembali. Untuk itu, diperlukan sekat kanal untuk memastikan tidak ada air yang keluar dari gambut tersebut. Upaya berikutnya, lahan harus ditahan agar tidak terbakar dan ekosistem pakis serta alang-alang yang tumbuh selama satu hingga dua tahun setelah kebakaran dapat terganti oleh vegetasi alam seperti jelutung, ramin, serta Geronggang.

Langkah Badan Restorasi Gambut (BRG) yang melakukan upaya percepatan revegetasi dengan terlebih dahulu membangun sekat kanal permanen. Jangan hanya mengandalkan material kayu agar target restorasi 5 tahun yang diusung pemerintah dapat tercapai.

PENUTUP

Provinsi Riau mempunyai luasan gambut sebesar 4. 360.740,2 hektar, dan dengan adanya regulasi otonomi daerah memberikan peluang kepada desa untuk dapat lebih meningkatkan kapsitasnya baik dari aspek infrastruktur, kelembagaan, usaha ekonomi, maupun sumber daya manusia. Peluang besar kepada desa untuk berkembanmg sesuai dengan karakteristik sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk sumberdaya lahan gambut. Faktor – faktor percepatan restorasi gambut di Kabupaten Rokan Hilir meliputi Faktor Sosial. Faktor Ekonomi. Faktor Alam.

Restorasi lahan gambut yang pernah terbakar didorong agar dilakukan lebih masif dengan tidak hanya mengandalkan vegetasi ulang (revegetasi), tetapi secara bersamaan dilengkapi dengan upaya pembudidayaan tanaman lokal. Indikator pertama dalam mengembalikan fungsi gambut ialah dengan membuat lahan tersebut dapat menyimpan air kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Sardjono. Agung dan Mustofa. 2004 Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal. Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Yogyakarta : Debut Press.
- BALIBANG PEMPROV RIAU. 2010. Seminar dan Lokakarya: Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau.
- Colchester. M.. dkk.. 2006. Ghosts on our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and the Roundtable on Sustainable Palm Oil. Bogor. Sawit Watch dan Forest People Programme.
- Creswell. John W. 1994. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. California: Sage Publications.
- Frasetiandy. Dwitho. 2009 "Menakar dampak sosial perkebunan sawit" dalam andy. on 03-09-2009 20:20 Views : 1460 Popular. Favoured : 31 Dwitho Frasetiandy.
- Firdaus. 2012. Perlindungan Hak Masyarakat Adat Studi Terhadap Tanah Ulayat Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Prosiding Seminar Internasional. Pekanbaru.
- Kausar. 2010. Konflik Kepentingan Dibalik Konservasi Studi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Jurnal IJAE No Volume 2. Nomor 1. Desember 2010. Jurusan Agribisnis Faperta UR. Pekanbaru

- Manajer Kampanye WALHI Kalsel andy@walhikalsel.org http://www.walhikalsel.org/content/view/131/48/
- Sumardjo. 2007. Metoda Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Sumardjo. 2009. Manajemen Konflik. Kolaborasi dan Kemitraan. Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan (CARE IPB). LPPM IPB. Bogor.
- Sumardjo. 2010. Revitalisasi Peran Penyuluh Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial